

POLICY BRIEF

MEMUPUK APLIKASI I-PUBERS DEMI PUPUK PETANI

Policy Brief ini ditulis oleh:

Tri Noor Aziza
 Tri Wahyuni
 Novi Prawitasari

Policy Brief ini ditujukan untuk:

Kementerian Pertanian
 Pemerintah Daerah

Ringkasan Eksekutif

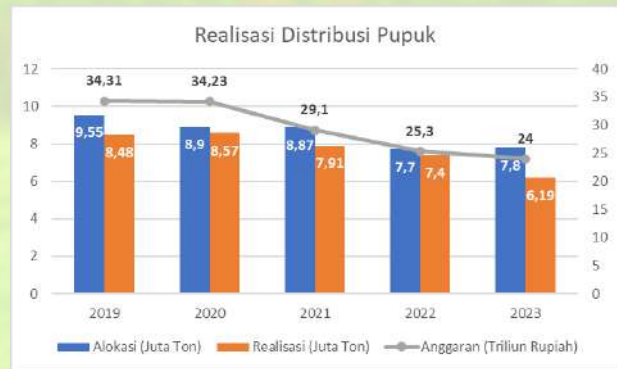
Integrasi pupuk bersubsidi dalam aplikasi i-Pubers yang merupakan hasil integrasi data penerima pupuk subsidi di e-alokasi dengan data stok pupuk ternyata belum mampu untuk menjawab problematika penyaluran pupuk bersubsidi yang tidak tepat sasaran. Hal ini disebabkan permasalahan aplikasi yang sering *error*, *blank spot area*, mekanisme pendistribusian belum efektif dan petani minim literasi digital. Adapun alternatif solusi yang ditawarkan adalah simplifikasi skema distribusi pupuk bersubsidi, maturitas performa aplikasi, akselesari literasi digital petani dan kolaborasi potensial-partner. Solusi yang direkomendasikan untuk dilaksanakan dalam waktu dekat adalah simplifikasi skema distribusi pupuk bersubsidi untuk mendukung tata kelola distribusi pupuk bersubsidi agar tepat sasaran.

PENDAHULUAN

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor penopang PDRB Indonesia, sehingga unsur pendukungnya harus diperhatikan, khususnya ketersediaan pupuk bersubsidi. Namun sejumlah permasalahan masih dirasakan, misalnya alokasi pupuk yang terbatas dan serapan pupuk bersubsidi yang rendah. Alokasi pupuk bersubsidi yang disalurkan hanya sebanyak 9,55 juta ton (sebelumnya 4,8 juta ton) padahal kebutuhan pupuk khususnya urea dan NPK bersubsidi sebanyak 10,7 juta ton. Sedangkan dalam hal serapan pupuk bersubsidi yang rendah, faktanya hingga bulan November 2023, serapan pupuk bersubsidi hanya mencapai 68% (rri.co.id, 2023). Ombudsman menyatakan bahwa rendahnya penyerapan ini mengindikasikan masih terdapat persoalan dalam penyaluran pupuk bersubsidi (Kompas, 2023).

Dari gambar di bawah ini, terlihat bahwa secara umum alokasi pupuk bersubsidi terus mengalami penurunan dari 9,55 juta ton di tahun 2019 menjadi 7,8 juta ton di tahun 2023. Hal ini disebabkan karena anggaran pupuk bersubsidi yang juga terus turun dalam periode tahun 2019-2023. Selain itu, capaian realisasi distribusi pupuk bersubsidi tidak pernah mencapai 100 persen, paling tinggi hanya mencapai 96 persen di tahun 2022.

Dilihat secara garis besar, jumlah kelompok tani di Indonesia mengalami lonjakan peningkatan dari 708.344 di tahun 2021 menjadi 726.321 di tahun 2023. Demikian pula dengan jumlah rumah tangga usaha pertanian yang angkanya melonjak sebanyak 6.599.055 menjadi sebanyak 28.419.398 di tahun 2023.



Untuk meningkatkan tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi, Kementerian Pertanian bersama PT. Pupuk Indonesia menghadirkan aplikasi i-Pubers (Integrasi Pupuk Bersubsidi) yang merupakan hasil integrasi data penerima pupuk subsidi di e-alokasi dengan data stok pupuk yang ada di Pupuk Indonesia. Kriteria petani yang mendapatkan pupuk bersubsidi ada dua. Pertama, luas lahan yang dimiliki tidak lebih dari 2 hektare. Kedua, petani harus tergabung dalam kelompok tani (www.rrl.co.id, 2024). Aplikasi ini menawarkan kemudahan transaksi atau penebusan pupuk bersubsidi dengan hanya membawa KTP. Kemudian kios akan melakukan input jumlah transaksi dan petani menandatangani buktinya pada aplikasi i-Pubers. Sejumlah manfaat aplikasi i-Pubers adalah (1) proses penebusan dan administrasi penebusan pupuk bersubsidi lebih teratur, (2) mampu menelusuri penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat kios berdasarkan NIK, dan (3) memudahkan pengaturan stok produk secara *real-time* (pupuk-indonesia.com, 2023).



Sebanyak 6 provinsi menjadi *pilot project* aplikasi i-Pubers yang di-launching pada bulan Juni 2023 yaitu Provinsi Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Adapun uji coba ini dilakukan pada 3.140 Kios resmi penyalur pupuk subsidi atau 12% dari total kios nasional, dan pupuk bersubsidi yang dialokasikan sebesar 713.527 ton atau 9% dari alokasi nasional. Namun, dalam penggunaan aplikasi i-Pubers masih terdapat sejumlah kendala sehingga belum dapat diterapkan secara maksimal.

DESKRIPSI MASALAH

Dalam penerapannya, aplikasi i-Pubers belum sepenuhnya berjalan lancar. Persoalan *blank spot* dan minimnya literasi teknologi mewarnai penggunaan aplikasi ini. Secara umum, terdapat empat kendala dalam penerapan aplikasi i-Pubers, sebagai berikut:

1. Banyak pengaduan server error.

Aplikasi i-Pubers yang digadang-gadang bakal dapat diakses secara nasional ternyata masih belum mampu memenuhi ekspektasi dikarenakan banyaknya pengaduan aplikasi yang sering *error*. Hal ini berdampak pada ketidaknyamanan dan kekecewaan bagi penggunanya. Server yang *error* sering kali membuat pengguna mengulang login ke aplikasi sehingga layanan menjadi tidak efektif. Contoh keluhan sebagai berikut:

"Sepertinya aplikasi belum siap dan tidak lengkap dengan fitur-fitur.. memudahkan tapi malah semakin sulit ...sering gangguan pada server.."

(Ulasan i-Pubers di Playstore)

"Sebenarnya apabila i-Pubers bisa berjalan lancar kami dari pihak pengecer bisa sangat terbantu. Tapi yang menjadi permasalahan kami selaku pengecer, adalah aplikasi server ipubers bermasalah, dan ini pun gangguannya tidak hanya terjadi di desa kami, hampir di seluruh wilayah kecamatan batanghari nuban" (Pesona Lampung News.com, 2024)



2. Blank spot area

Kondisi terberat selanjutnya terkait penerapan aplikasi i-pubers adalah masalah jaringan internet hingga *blank spot*. Masih banyak wilayah di Indonesia yang memiliki *blank spot* area. Secara umum i-Pubers telah beroperasi di enam provinsi *pilot project*. Menurut Yana, Senior Project Manager Advokasi Publik Pupuk Indonesia, berdasarkan hasil evaluasi, ada kendala *blank spot* di 363 kios (11,5%) dari total kios i-Pubers (Republika.co.id, 2023).

3. Mekanisme pendistribusian belum efektif

Adanya beberapa mekanisme pendistribusian pupuk hingga ke tangan para petani dalam kondisi tertentu, menampakkan belum efektifnya mekanisme pendistribusian pupuk berbasis aplikasi i-pubers. Untuk mendapatkan pupuk bersubsidi, petani tetap harus datang ke kios yang ditunjuk PT pupuk untuk menebus pupuk dengan membawa KTP. Selain itu pengambilan juga harus difoto seluruh badan beserta pupuk untuk menginfokan lokasi dengan geotagging (ekonomi.republika.co.id, 2023). Bagi petani yang berhalangan harus membuat surat kuasa bertanda tangan kepala desa dan ketua gapoktan ketika pengambilan pupuk diwakilkan (Jawapos.com, 2024).

4. Kolaborasi potensial-partner

Pemerintah daerah (pemda) dapat berkolaborasi dengan berbagai pihak seperti pemda lain, swasta, perguruan tinggi, komunitas/LSM, seperti: a) kerjasama dengan pemda lain yang telah memiliki jaringan internet yang terbatas dengan daerah *blank spot*. b) mengoptimalkan forum CSR untuk mendukung penyediaan jaringan internet di wilayah yang masih minim akses internet. c) kerjasama dengan provider internet yang ada di daerah/ingin berinvestasi di daerah agar menyediakan akses internet di daerah *blank spot* dengan memberikan kemudahan dalam hal perizinan. d) kerjasama melalui pengabdian masyarakat civitas akademis untuk turut membangun desa digital melalui KKN tematik. e) melibatkan komunitas/LSM dalam program-program pemda untuk peningkatan penggunaan TIK di pedesaan.

ALTERNATIF SOLUSI

1. Simplifikasi skema distribusi pupuk

Selama masa transisi manual ke digital, transaksi dilakukan di kios pupuk dengan bukti foto geotagging. Setelah i-Pubers *go live* ini harapannya petani dapat bertransaksi dimana saja, tidak perlu datang ke kios lagi, dan pendistribusian pupuk dapat dilakukan dengan menggandeng kelompok tani atau penyedia jasa layanan logistik yang ada di daerah.

2. Maturitas performa aplikasi

Performa aplikasi dapat ditingkatkan dengan 2 langkah: 1) monitoring dan evaluasi (monev) pengaduan aplikasi, 2) pengembangan aplikasi i-Pubers. Monitoring dengan pemantauan terhadap pengaduan aplikasi. evaluasi untuk menganalisis masalah aplikasi dan untuk menentukan rencana tindak lanjut kebijakan yang dilakukan. Adapun pengembangan aplikasi dengan mengatur ulang pengaturan aplikasi i-Pubers, seperti pengaturan data, pengguna, sistem, dan keamanan, serta memperbaiki sistem server berdasarkan hasil monev.

3. Akselerasi literasi digital petani

Perlu dilakukan sosialisasi secara lebih intensif kepada petani mengenai aplikasi i-Pubers. Peran penyuluh pertanian sebagai garda terdepan bekerja sama dengan kelompok tani dalam memberikan informasi dan pendampingan langsung ke petani menjadi sangat penting untuk memfasilitasi petani mengadopsi teknologi digital pertanian.

4. Kolaborasi potensial-partner

Pemerintah daerah (pemda) dapat berkolaborasi dengan berbagai pihak seperti pemda lain, swasta, perguruan tinggi, komunitas/LSM, seperti: a) kerjasama dengan pemda lain yang telah memiliki jaringan internet yang berbatasan dengan daerah *blank spot*. b) mengoptimalkan forum CSR untuk mendukung penyediaan jaringan internet di wilayah yang masih minim akses internet. c) kerjasama dengan provider internet yang ada di daerah/ingin berinvestasi di daerah agar menyediakan akses internet di daerah blank spot dengan memberikan kemudahan dalam hal perizinan. d) kerjasama melalui pengabdian masyarakat civitas akademis untuk turut membangun desa digital melalui KKN tematik. e) melibatkan komunitas/LSM dalam program peningkatan penggunaan TIK di pedesaan.

REKOMENDASI

Simplifikasi Skema Distribusi Pupuk menjadi Alternatif solusi yang direkomendasikan untuk dilaksanakan dalam waktu dekat, sambil meningkatkan Maturitas Performa Aplikasi. Penyederhanaan skema distribusi penting untuk mendukung tata kelola distribusi pupuk bersubsidi agar tepat sasaran. Adapun alternatif solusi lainnya dapat dilakukan sebagai pendukung alternatif yang direkomendasikan.

Daftar Pustaka

Kompas, 2023. Alokasi Pupuk Bersubsidi 2024 di Bawah Kebutuhan. Diunduh dari <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/12/06/alokasi-pupuk-bersubsidi-2024-jauh-di-bawah-kebutuhan>
Republika.co.id, 2023. Penyaluran Pupuk Subsidi Pakai Aplikasi Masih terkendala Sinyal dan Listrik. Diunduh dari <https://ekonomi.republika.co.id/berita/s58fhp502/penyaluran-pupuk-subsidi-pakai-aplikasi-masih-terkendala-sinyal-dan-listrik>
RRI.co.id, 2024. Kriteria Petani yang Bisa Mendapatkan Pupuk Bersubsidi. Diunduh dari <https://www.rri.co.id/daerah/525380/kriteria-petani-yang-bisa-mendapatkan-pupuk-bersubsidi>